

PENGARUH VARIAN ANGGARAN, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Safira Izzatul Afifah¹, Adnan Adnan^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: safiraizzatul135@gmail.com¹, adnan_bensaadi@unsyiah.ac.id^{*2}

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670>

Abstract

This study aims to examine the effect of budget variance, local government size and fiscal capacity on the financial performance of district/city governments in Aceh in 2018-2020 based on efficiency ratios and effectiveness ratios. The data used is secondary data from local government financial reports that have been audited by BPK RI. The data analysis method used is Spearman's Rho Correlation, Multiple Linear Regression Test and Coefficient of Determination Test. This study uses two regression models. The first model of the dependent variable of financial performance is measured using the efficiency ratio and in the second model the dependent variable of financial performance is measured using the effectiveness ratio. The results showed that the budget variance and fiscal capacity partially had no effect on the financial performance of local governments based on efficiency ratios, while the variable size of local government has a negative and significant effect on the financial performance of local governments based on efficiency ratios. In the second model that uses the effectiveness ratio, budget variance and fiscal capacity have a negative and significant effect on local government financial performance, while the variable size of local government has no significant effect on the financial performance of local governments based on the effectiveness ratio. The result of the Coefficient of Determination analysis is 0.023, which means that the budget variance, size of local government and fiscal capacity can explain 2.3% of local government financial performance based on efficiency ratios. While in model 2, the coefficient of determination is 0.246, which means that the budget variance, the size of the local government and the fiscal capacity can explain 24.6% of the financial performance of the local government based on the effectiveness ratio.

Keywords: Budget Variances, Size of Local Government, Fiscal Capacity, Finance Performance of Local Government, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio.

1. PENDAHULUAN

UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan untuk mengatur terkait Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan otonomi daerah secara lebih jelas dan terperinci. Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan kebebasan yang akan mendorong pembangunan manajemen kelembagaan ke arah yang lebih baik serta dapat menetapkan bagaimana standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat (Rikza, 2022). Otonomi daerah ini diharapkan mampu mendorong daerah untuk lebih cekatan dalam mengenali dan terus menemukan potensi yang ada dan juga mengalokasikannya sesuai

kebutuhan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.

Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola sumber data daerah. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga penerapan kebijakan otonomi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari

aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat yang berkualitas tinggi, memiliki visi yang statejistik, serta memiliki moral yang baik. Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut agar dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Sedangkan dari aspek evaluasi yaitu pemerintah daerah perlu untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan aturan keuangan dengan baik dan benar.

Pencapaian dalam mengelola keuangan atas operasional dalam aktivitas kesehariannya dicerminkan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengandung visi, misi dan tujuan pemerintah daerah (Mahsun, 2013). Saraswati dan Rioni (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja adalah sebagai alat komunikasi dengan publik atas dasar melakukan evaluasi program yang dijalankan serta layanan yang disuguhkan (Halim, 2014: 267).

Rasio efisiensi menggambarkan motif ekonomi dimana dengan biaya tertentu dapat menghasilkan keuntungan maksimal dimana semakin kecil rasio ini maka menunjukkan kinerja keuangan daerah semakin baik (Mardiasmo, 2013). Rasio efektivitas menggambarkan seberapa mampu pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah disusun. Dimana akan diakui efektif apabila rasio mencapai angka minimal 100 dan semakin tinggi angka rasio yang dicapai maka kemampuan daerah semakin efektif (Halim, 2004).

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya ialah varian anggaran yang merupakan selisih antara rencana total dan realisasi yang terjadi. Varian anggaran terbagi menjadi dua yaitu varian pendapatan dan varian belanja. Varian anggaran pendapatan akan disukai apabila realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan. Sementara pada varian anggaran belanja, jika realisasinya lebih kecil dari anggaran maka kinerja pemerintah akan dinilai baik (Mahmudi, 2006: 157).

Selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran pemerintah daerah yang dapat menggambarkan seberapa besar entitas pemerintahan tersebut (Suhardjanto *et al*, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016),

ukuran pemerintah diproyeksikan menggunakan total aset dimana semakin besar jumlah aset yang dimiliki maka kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan akan lebih mudah pula untuk melayani masyarakat dengan maksimal (Kusumawardani, 2012).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kapasitas fiskal yang telah diatur kebijakannya dalam Permen RI No.116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dimana diproyeksikan dengan rasio antara pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki cukup banyak dana untuk merealisasikan program kerjanya.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait topik serupa seperti Mulyani dan Wibowo (2017) dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah dengan arah negatif namun tidak sejalan dengan penelitian Nugroho dan Prasetyo (2019), yang memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Selain itu Callahan dan Waymire (2007) meneliti dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektif pengendalian anggaran yang diukur menggunakan varian anggaran berpengaruh dengan arah negatif pada kinerja. Hal ini didukung pula oleh penelitian Aminah dan Lindrianasari (2013) dan Borge *et al* (2008) yang menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal yang tinggi memiliki kontribusi terhadap efisiensi yang rendah.

Diketahui bahwa masih ada beberapa kabupaten/kota di provinsi Aceh yang memiliki efisiensi yang belum baik. Pemerintah daerah yang memiliki rasio yang tidak efisien adalah Kota Lhokseumawe dengan persentase efisiensi sebesar 103,35 persen dan Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki persentase efisiensi 117,12 persen. Hal ini menandakan bahwa masih ada kabupaten/kota yang belum mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik. Sedangkan jika diukur menggunakan rasio efektivitas, terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang masih belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki

tingkat persentase efektivitas dibawah 80% dengan kriteria kurang efektif dan tidak efektif, diantaranya yang memiliki kriteria kurang efektif adalah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Subulussalam, sementara Kabupaten Bener Meriah memiliki persentase efektivitas 55,26% dengan kriteria tidak efektif. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh masih memiliki kendala dalam pengelolaan keuangannya.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling dalam Kholmi (2010) menjelaskan tentang teori agensi dengan definisi “hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen”. Dalam semua model agensi, individu diasumsikan dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri. Masalah keagenan muncul ketika perilaku kooperatif yang memaksimalkan kesejahteraan kelompok tidak sesuai dengan kepentingan pribadi individu (Kholmi, 2010). Dua sisi kepentingan yang berbeda seringkali menimbulkan konflik. Publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam latar belakang diatas bahwa masih adanya kendala pada kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Maka dari itu diperlukan pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agen untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 37 tentang pengelolaan keuangan daerah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Sari (2016) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu bentuk kinerja dalam hal penerimaan dan belanja di bidang keuangan daerah dengan menerapkan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui satu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang dimaksud bukanlah sekadar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data yang bersumber dari APBD adalah:

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013).

2. Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa “rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kinerja keuangan yang semakin baik.

Varian Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran, besarnya anggaran yang diperkirakan tidak selalu sama dengan nilai sebenarnya atau jumlah realisasinya, sehingga menimbulkan selisih yang disebut varian anggaran (Witjaksono dalam Husain, 2014). Varian anggaran terbagi menjadi dua yaitu varian pendapatan dan varian belanja.

1. Varian Anggaran Pendapatan

Varian pendapatan merupakan selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada akhir tahun anggaran. Pada saat penentuan target pendapatan cenderung digunakan basis minimum, yang berarti pemerintah memiliki kecenderungan untuk menganggarkan pendapatan lebih rendah dari kemampuan maksimalnya (Abdullah dan Nazry, 2014). Dikarenakan varian anggaran pendapatan menjadi indikator dalam penyusunan anggaran, akibatnya penyusun anggaran cenderung akan bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran pendapatan pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar lebih mudah untuk mencapai realisasinya. Nilai Varian anggaran pendapatan dapat diketahui dengan cara menghitung selisih antara realisasi anggaran pendapatan dengan yang dianggarkan. Varian anggaran pendapatan dapat dikatakan baik jika memperoleh realisasi pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi anggaran pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian.

2. Varian Anggaran Belanja

Dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) selisih baik (*favourable variance*) dan 2) kurang baik (*unfavorable variance*). Nilai varian anggaran belanja yang cukup signifikan dapat memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran tersebut dengan baik. Semakin kecil varian anggaran, maka semakin besar serapan anggaran dan

menggambarkan kemampuan pemerintah dalam pencapaian target-target pembangunan (Ruhmaini et al, 2018).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). PP No.71 Tahun 2010 memberikan definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan akan diperoleh.

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Menurut Kusumawardani (2012) kegiatan operasional daerah akan lebih mudah jika ukuran pemerintah daerah yang besar, dimana hal tersebut juga akan mempermudah dalam memberi pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Pemerintah daerah dengan aset yang besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Dengan demikian, tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal daerah dituangkan dalam peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan Menteri Keuangan secara berkala dan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas fiskal merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Besarnya pendapatan yang diperoleh daerah mencerminkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kapasitas fiskal yang memadai dan disertai dengan kemandirian fiskal merupakan tuntutan

yang harus diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah daerah saat ini.

Besarnya kapasitas fiskal suatu daerah akan mempengaruhi jumlah biaya pembangunan pada APBD, semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, maka kegiatan dan rencana pembangunan daerah dapat terealisasi dengan lebih cepat, sehingga dapat mempercepat pembangunan yang menunjukkan adanya peningkatan pada kinerja keuangan pemerintah ke arah yang positif (Amelia, 2010).

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Varian Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori agensi, pada saat penyusunan anggaran pendapatan, pemerintah cenderung menentukan target anggaran di bawah potensi pendapatan yang sesungguhnya (Abdullah dan Nazry, 2015). Hal ini dilakukan karena adanya *self interest* yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah yaitu kemudahan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, walaupun tidak secara efektif dan efisien (Abdullah dan Nazry, 2015). Kondisi ini akan menyebabkan adanya varian anggaran. Varian anggaran pendapatan dalam jumlah yang besar akan menunjukkan pengelolaan keuangan yang buruk (Callahan dan Waymire, 2007). Varian anggaran juga mengindikasikan bahwa pemerintah belum bekerja secara maksimal dalam menggali potensi sumber daya daerah untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Sementara pada saat penyusunan anggaran belanja, pemerintah cenderung mengusulkan jumlah yang lebih besar dari kebutuhan yang sesungguhnya (Abdullah dan Nazry, 2015). Sama halnya dengan penyusunan anggaran pendapatan, hal ini dilakukan karena adanya *self interest* yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah yaitu berupa *enjoyment* di tempat kerja (Von Hagen, dalam Abdullah, 2015). Varian anggaran belanja dalam jumlah yang besar akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Callahan dan Waymire, 2007). Semakin kecil nilai varian anggaran belanja mengindikasikan semakin baiknya tingkat penyerapan anggaran belanja (Nilansyah dan Biswan, 2018).

Berdasarkan kedua pola *self interest* tersebut, yaitu *under-estimated* untuk pendapatan dan *over-*

estimated untuk belanja, ditemukan bahwa varian anggaran yang mendekati nol layak untuk kinerja yang lebih tinggi (Callahan dan Waymire, 2007). Maka dari itu, Pengelolaan anggaran secara optimal dan *output* yang telah tercapai akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang baik. Kuncoro (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa besaran varian anggaran berkorelasi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Callahan dan Waymire (2007) menyimpulkan bahwa varian anggaran pendapatan dan varian anggaran belanja memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah dan Lindrianasari (2013) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu varian anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki atau total aset. Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Ukuran daerah yang besar akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Semakin besarnya ukuran daerah yang juga ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Hasil penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Wafa dan Trisnawati (2018) menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Merujuk pada PMK Nomor 116 Tahun 2021, Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah yang dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Semakin meningkatnya kapasitas fiskal daerah maka pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan yang baik berarti daerah tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan (Pujawati *et al*, 2019). Semakin besarnya kontribusi kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Trukna (2019) bahwa kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Borge *et al* (2008) menunjukkan hasil bahwa kapasitas fiskal yang tinggi memiliki kontribusi terhadap efisiensi yang rendah.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Varian anggaran pendapatan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2: Varian anggaran belanja berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H4: Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H5: Varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, kapasitas fiskal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah daerah dan kapasitas

fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1:

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Model 2:

$$Y2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana Y1 adalah rasio efisiensi, Y2 adalah rasio efektivitas, α adalah konstanta, $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ adalah koefisien regresi X1 adalah varian anggaran pendapatan, X2 adalah varian anggaran belanja, X3 adalah ukuran pemerintah daerah, X4 adalah kapasitas fiskal dan ϵ adalah *error*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, pada pengujian normalitas dilakukan uji *kolmogorov smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Model 1

	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,083	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Model 2

	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari hasil uji *kolmogorov-smirnov* di atas, dihasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,083 dan 0,200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

data residual dalam model regresi ini telah terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0,05.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) besarnya hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,297 ^a	,088	,023	,081254

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
2	,544 ^a	,296	,246	,140839

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji Koefisien determinasi *Adjusted R Square* diperoleh nilai sebesar 0,023 atau 2,3% untuk model 1 dan sebesar 0,246 atau 24,6% untuk model 2. Nilai tersebut berarti bahwa kemampuan varian anggaran pendapatan, varian anggaran belanja, ukuran pemerintah daerah dan kapasitas fiskal untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio efisiensi adalah sebesar 2,3%, sedangkan dengan menggunakan rasio efektivitas adalah sebesar 24,6%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Uji signifikansi-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji signifikansi-t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial. Apabila *thitung* > *ttabel* atau nilai sig. < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya. Nilai *ttabel* diketahui setelah menentukan

terlebih dahulu nilai *degree of freedom* (df). Nilai df pada penelitian ini adalah 56, maka diperoleh nilai *ttabel* senilai 1,672. Berikut adalah tabel nilai dari Uji Statistik t:

Tabel 5. Hasil Analisis Korelasi Model 1

Variabel	N	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	Interpretasi
Varian Anggaran Pendapatan	69	0,049	0,691	Sangat Lemah
Varian Anggaran Belanja	69	-0,153	0,211	Sangat Lemah
Ukuran Pemerintah Daerah	69	-0,433	0,000	Sedang
Kapasitas Fiskal	69	-0,075	0,542	Sangat Lemah

Sumber: Data Diolah (2022)

Adapun hasil analisis korelasi *Spearman's Rho* pada penelitian ini untuk model 1 adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi untuk variabel varian anggaran pendapatan diperoleh nilai sebesar 0,049. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “0,00 – 0,199” yang berarti tingkat hubungan varian anggaran pendapatan terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sangat lemah dan arah hubungannya adalah positif. Hasil tersebut adalah tidak signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai sig. (*2-tailed*) $0,691 > 0,05$.
2. Nilai koefisien korelasi untuk variabel varian anggaran belanja diperoleh nilai sebesar -0,153. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “0,00 – 0,199” yang berarti tingkat hubungan varian anggaran belanja terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sangat lemah dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah tidak signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai sig. (*2-tailed*) $0,211 > 0,05$.
3. Nilai koefisien korelasi untuk variabel ukuran pemerintah daerah diperoleh nilai sebesar -0,433. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “0,400 – 0,599” yang berarti tingkat hubungan ukuran pemerintah

daerah terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sedang dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,000 < 0,05$.

4. Nilai koefisien korelasi untuk variabel kapasitas fiskal diperoleh nilai sebesar $-0,075$. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “ $0,00 - 0,199$ ” yang berarti tingkat hubungan kapasitas fiskal terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sangat lemah dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah tidak signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,542 > 0,05$.

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi Model 2

Variabel	N	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	Interpretasi
Varian Anggaran Pendapatan	69	-0,540	0,000	Sedang
Varian Anggaran Belanja	69	-0,114	0,351	Sangat Lemah
Ukuran Pemerintah Daerah	69	0,043	0,725	Sangat Lemah
Kapasitas Fiskal	69	-0,240	0,047	Lemah

Sumber: Data Diolah (2022)

Adapun hasil analisis korelasi *Spearman's Rho* pada penelitian ini untuk model 2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi untuk variabel varian anggaran pendapatan diperoleh nilai sebesar $-0,540$. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “ $0,400 - 0,599$ ” yang berarti tingkat hubungan varian anggaran pendapatan terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sedang dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,000 < 0,05$.
2. Nilai koefisien korelasi untuk variabel varian anggaran belanja diperoleh nilai sebesar $-0,114$.

Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “ $0,00 - 0,199$ ” yang berarti tingkat hubungan varian anggaran belanja terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sangat lemah dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah tidak signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,351 > 0,05$.

3. Nilai koefisien korelasi untuk variabel ukuran pemerintah daerah diperoleh nilai sebesar $0,043$. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “ $0,00 - 0,199$ ” yang berarti tingkat hubungan ukuran pemerintah daerah terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang sedang dan arah hubungannya adalah positif. Hasil tersebut adalah tidak signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,725 > 0,05$.
4. Nilai koefisien korelasi untuk variabel kapasitas fiskal diperoleh nilai sebesar $-0,240$. Berdasarkan pedoman pemberian interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang “ $0,200 - 0,399$ ” yang berarti tingkat hubungan kapasitas fiskal terhadap rasio efisiensi termasuk pada tingkat hubungan yang lemah dan arah hubungannya adalah negatif. Hasil tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dikarenakan nilai *sig. (2-tailed)* $0,047 > 0,05$.

Persamaan Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program SPSS 26 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Regresi Model 1

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
2	(Constant)	2.605	.975		2.671	.010
	Varian Anggaran Pendapatan	.000	.003	.010	.074	.941
	Varian Anggaran Belanja	.000	.003	-.005	-.037	.971
	Ukuran Pemerintah Daerah	-.065	.031	-.286	-2.062	.044
	Kapasitas Fiskal	.072	.046	.222	1.575	.121

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari hasil analisis regresi linear berganda di atas, maka dapat ditulis model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y1 = 2,605 + 0,000X1 + 0,000X2 - 0,065X3 + 0,072X4$$

Dari model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2,605. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai varian anggaran pendapatan, varian anggaran belanja, ukuran pemerintah daerah dan kapasitas fiskal adalah 0, maka besarnya rasio efisiensi adalah 2,605.
2. Nilai koefisien regresi variabel varian anggaran pendapatan sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila varian anggaran pendapatan bertambah satu persen, maka rasio efisiensi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Namun hasil ini tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.
3. Nilai koefisien regresi variabel varian anggaran belanja sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat

diartikan bahwa apabila varian anggaran belanja bertambah satu persen, maka rasio efisiensi tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Namun hasil ini tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.

4. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar -0,065. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila ukuran pemerintah daerah bertambah satu persen, maka rasio efisiensi akan mengalami penurunan sebesar 0,065 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Hasil ini signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.
5. Nilai koefisien regresi variabel kapasitas fiskal sebesar 0,072. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kapasitas fiskal bertambah satu persen, maka rasio efisiensi akan mengalami peningkatan sebesar 0,072 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Namun hasil ini tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.

Tabel 8. Hasil Regresi Model 2

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
2	(Constant)	2.095	1.674		1.252	.216
	Varian Anggaran Pendapatan	-.017	.006	-.351	-3.030	.004
	Varian Anggaran Belanja	-.020	.006	-.393	-3.328	.002
	Ukuran Pemerintah Daerah	.090	.054	.203	1.670	.100
	Kapasitas Fiskal	-.213	.079	-.332	-2.695	.009

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari hasil analisis regresi linear berganda di atas, maka dapat ditulis model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_2 = 2,095 - 0,017X_1 - 0,020X_2 + 0,090X_3 - 0,213X_4$$

Dari model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2,095. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai varian anggaran pendapatan, varian anggaran belanja, ukuran pemerintah daerah dan kapasitas fiskal adalah 0, maka besarnya rasio efektivitas adalah 2,095.
2. Nilai koefisien regresi variabel varian anggaran pendapatan sebesar -0,017. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila varian anggaran pendapatan bertambah satu persen, maka rasio efektivitas akan mengalami penurunan sebesar 0,017 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Hasil ini signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.
3. Nilai koefisien regresi variabel varian anggaran belanja sebesar -0,020. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila varian anggaran belanja bertambah satu persen, maka rasio efektivitas akan mengalami penurunan sebesar 0,020 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Hasil ini signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.
4. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,090. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila ukuran pemerintah daerah bertambah satu persen, maka rasio efektivitas akan mengalami peningkatan sebesar 0,090 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Namun hasil ini signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.
5. Nilai koefisien regresi variabel kapasitas fiskal sebesar -0,213. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kapasitas fiskal bertambah satu persen, maka rasio efektivitas akan mengalami penurunan sebesar 0,213 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Hasil ini signifikan pada $\alpha = 0,05$ dari hasil uji korelasi.

Pembahasan

Pengaruh Varian Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah varian anggaran (pendapatan dan belanja) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan hasil analisis analisis regresi linear berganda, pada model 1 diperoleh nilai koefisien determinasi 0,000 dengan nilai signifikansi 0,941 dan 0,971 yang lebih besar dari 0,05, artinya varian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Pada model 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (-0,017) dan (-0,020) dengan nilai signifikansi 0,004 dan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, artinya varian anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas. Ini menunjukkan bahwa semakin besar varian anggaran, maka semakin kecil kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efektivitas.

Varian anggaran merupakan selisih antara target anggaran dengan jumlah realisasinya. Adanya varian anggaran disebabkan oleh ketidak-akuratan penetapan target anggaran pada saat penyusunan anggaran (Abdullah dan Nazry, 2015). Sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dimana dalam hubungan antara prinsipal dengan agen terdapat asumsi tentang sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*). Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal (masyarakat) tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal, sehingga masyarakat sebagai prinsipal seringkali merasa tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah daerah. Varian anggaran terjadi akibat adanya *self interest* yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah pada saat penyusunan anggaran. Varian anggaran dalam jumlah yang besar dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini telah terbukti dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Callahan dan Waymire (2007) dan Aminah dan Lindrianasari (2013) yang juga menyimpulkan bahwa

varian anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, pada model 1 diperoleh nilai koefisien determinasi (-0,065) dengan nilai signifikansi 0,044 yang lebih kecil dari 0,05, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin kecil rasio efisiensi. Pada model 2 diperoleh nilai koefisien determinasi 0,090 serta nilai signifikansi 0,100 yang lebih besar dari 0,05, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas.

Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa ketika pemerintah daerah meningkatkan ukuran daerahnya (total asetnya), maka akan mengakibatkan penurunan pada rasio efisiensi. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013). Ukuran daerah yang besar akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional pemerintah yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Pemerintah tentunya harus mengelola aset dengan sebaik-baiknya agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pemerintah melalui kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio efisiensi. Sedangkan untuk rasio efektivitas, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini tentunya berbeda dengan model pertama pada penelitian ini yang menggunakan rasio efisiensi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ukuran pemerintah daerah yang besar tidak menjamin bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan target PAD yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah yang

memiliki ukuran besar maupun kecil memiliki potensi yang sama untuk merealisasikan PAD yang ditargetkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio efisiensi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) dan Wafa dan Trisnawati (2018) yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio efisiensi.

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Kapasitas Fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, pada model 1 diperoleh nilai koefisien determinasi 0,072 dengan nilai signifikansi 0,121 yang lebih besar dari 0,05, artinya kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Pada model 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (-0,213) serta nilai signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 0,05, artinya kapasitas fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kapasitas fiskal, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas, dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efektivitas. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah bersifat distorsi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruhnya yang negatif signifikan mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum dikelola secara cermat dan tepat. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dikatakan belum berhasil dalam mengelola pendapatan yang memang

ditujukan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Varian anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efektivitas, varian anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh yang diukur menggunakan rasio efisiensi.
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efisiensi, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efektivitas.
3. Kapasitas fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efektivitas, kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efisiensi.
4. Varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efektivitas, varian anggaran, ukuran pemerintah daerah dan kapasitas fiskal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh yang diukur menggunakan rasio efisiensi.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaca sebuah gambaran mengenai pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah saran yang dapat dipertimbangkan.

Saran Praktis

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah yang masih menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien dan kurang efektif, maka diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. pemerintah daerah harus mampu menggunakan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memperkecil belanja yang kurang produktif untuk menciptakan efisiensi anggaran.
2. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber pendapatan dari tiap daerah sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah yang telah berjalan diharapkan mampu menjadi pemacu tiap daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Saran Akademis

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah selain rasio efisiensi dan efektivitas, yaitu pengukuran dengan rasio kemandirian, aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Periode pengamatan pada penelitian ini yaitu hanya 3 tahun dari periode 2018 sampai dengan 2020. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan periode waktu penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran pemerintah Daerah. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 272-283.
- Amelia, A. (2010). Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal, Investasi Swasta dan Tingkat Partisipasi

- Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Aminah & Lindrianasari. (2013). Accountability and Financial performance of local government in Indonesia. *The First International Conference on Law, Business and Government*.
- Ayuningsih, D. (2016). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
- Borge, L., Falch, T & Tovmo, P. (2008). Public Sector Efficiency : the roles of political and budgetary institution, fiscal capacity and democratic participation. *Public Choice*, 475-495. <https://doi.org/10.1007/s11127-008-9309-7>.
- Callahan, C.M. & Waymire, T.R. (2007). An Examination Of The Effect Of Budgetary Control On Performance : Evidence From Cities. *AAA 2008 MAS Meeting Paper*.
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Jurnal EKBIS*, XIV(2), 677-689.
- Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Kinerja Keuangan.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Husain, A.P. (2014). Analisis Varians Biaya Produksi Sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Efisiensi Biaya Produksi Pada UD. Berkat Anugrah. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1129-1138.
- Jensen, M.C. & William H.M. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Junita, A. (2018). The Effect Of Budget Variances On The Local Government Budget Changes With Legislature Size As Moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 167-173.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika Bisnis*, 2(2), 357-370.
- Kuncoro, H. (2008). Variansi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 1(2), 126-143.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 28-35.
- Lastowo, H. (2010). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Minarsih, R.A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mulyani, S. & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Kompartmen*, XV(1), 66.
- Mustikarini, W.A. & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>.
- Niansyah, F.I Wahyu & Biswan, A Tafriji. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja Untuk Pengukuran Kinerja. *Indonesian Treasury Review*, 3(4), 348-363.
- Noviyanti, N.A. & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).

- Nugroho, T.R & Prasetyo, N.E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.
- Patriarti, R. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pujawati, Badri, H & Agustiani, E. (2019). Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 24-24.
- Rikza, M.F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance*. *Public Service and Governance*, 3(10), 81-86.
- Ruhmaini, Abdullah, S. & Darwanis. (2018). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31-43.
- Saraswati, D & Rioni, Y.S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, I.P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679-692.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., & Brown, A. (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics : Evidence from Indonesian Municipalities. *Penelitian Hibah Publikasi Internasional*, LP2M UNS.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Surepno. (2013). Pengaruh Return On Equity (ROE), Ukuran (*Size*) dan Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Trukna, E.Y. (2019). Pengaruh Kapasitas Fiskal, Ukuran Pemerintah dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2014-2018. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Vazquez, J.M. & Boex, L.F.J. (1997). Fiscal Capacity: An Overview of Concepts and Measurement Issues and Their Applicability in Russian Federation. *SSRN Electronic Journal*.
- Wafa, M & Trisnawati, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zami, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*. 3(2), 121-130.
- Zamra, Sawatul & Ernawati. (2019). Perkembangan Kabupaten Solok Setelah Otonomi Daerah Tahun 1998-2019. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 4(2), 53-58.